BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian dibagi menjadi dua sektor yang berperan penting dalam suatu negara, meliputi sektor fiskal dan moneter. Untuk mewujudkan tujuan perekonomian suatu negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka kedua sektor tersebut harus sejalan dan saling menguatkan. Pengelolaan juga dilaksanakan untuk memelihara kestabilan pertumbuhan ekonomi (Ismail, 2014).

Kebijakan dalam ranah fiskal disusun untuk menjawab setiap permasalahan ekonomi yang muncul, seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, serta masalah kemiskinan dan kesenjangan melalui pengelolaan APBN yang meliputi pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan. Kebijakan fiskal juga disusun untuk mengembangkan perekonomian sektor riil, yaitu meningkatkan produktivitas barang dan jasa (output perekonomian). Sementara itu, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan penguasa moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan kredit. Uang dalam suatu perekonomian merupakan unit yang sangat penting, baik sebagai satuan unit, menyimpan aset, ataupun sebagai alat transaksi. Di Indonesia, kebijakan moneter diatur oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (www.bi.go.id).

Kebijakan moneter memiliki kecenderungan kontradiktif dengan tujuan akhir kebijakan makro. Sebagai contoh, ketika bank Indonesia fokus untuk menekan laju inflasi yaitu dengan meningkatkan suku bunga, maka hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena rendahnya permintaan kredit. Begitu pula, ketika pertumbuhan ekonomi masif dimana permintaan akan kredit juga tinggi, maka inflasi akan meningkat sehingga akan menciptakan *overheating economy*. Untuk itulah, saat ini Bank Indonesia fokus terhadap sasaran kestabilan rupiah, hal tersebut

sesuai dengan amanah Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

Guna menciptakan perekonomian yang menyejahterakan masyarakat, maka antara sektor moneter dan fiskal harus saling terkait. Oleh karenanya, perkembangan pada sektor moneter, seperti meningkatnya aset, kredit yang disalurkan, serta inklusi keuangan harus memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui berbagai instrumennya tidak langsung dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang diberikan oleh kebijakan moneter bersifat tidak langsung atau disebut mekanisme transmisi. Transmisi kebijakan moneter melibatkan dua interaksi, yaitu antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lain serta antara perbankan dan lembaga keuangan lain dengan para pelaku ekonomi (Warjiyo, 2004).

Kenyataanya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan “*black box*”. Transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama diakui berlangsung dengan tenggat waktu yang lama dan bervariasi. Secara keseluruhan, pengaruhnya dapat berlangsung sekitar 6-8 kuartal (Warjiyo, 2016). Hal inilah yang menyebabkan sejak dahulu, moneter adalah persoalan yang amat besar (Ismail, 2014).

Kompleksitas kebijakan moneter tersebut semakin rumit dengan dikeluarkannya UU Perbankan tahun 1998, dimana Indonesia secara *de jure* telah menerapkan sistem perbankan ganda (Sugianto, 2015), yaitu konvensional dan syariah. Dengan adanya dualisme tersebut, Indonesia juga memiliki sistem moneter yang ganda, yaitu sistem suku bunga dan bagi hasil. Perbankan Syariah sendiri masuk di Indonesia sekitar tahun 1992, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank dengan prinsip syariah pertama di Indonesia. Ketika krisis finansial tahun 1997 dan berpuncak pada tahun 1998, Bank Muamalat dengan menggunakan sistem non-bunga menjadi

bank yang paling tahan terhadap efek krisis. Krisis terebut telah membuat 16 bank terpaksa ditutup oleh Bank Sentral karena mengalami masalah likuiditas, sementara Bank Syariah masih bertahan walaupun profitnya mengalami penurunan.

Indikator perbankan dan perekonomian di Indonesia masa krisis dapat dilihat pada tabel 1.1, dimana tingkat inflasi mengalami peningkatan yang signifikan ketika terjadi puncak krisis yaitu tahun 1998 sebesar 58,451 setelah tahun 1997 berada pada angka 6,226 dan PDB pada angka negatif dua digit sebesar 13,127% setelah sebelumnya masih tumbuh pada level 4,7%. Tidak hanya itu, indikator keuangan seperti *lending rate, deposito rate, reserve* dan *exchange rate* juga ikut terdampak akibat krisis yang terjadi

Tabel 1.1
Indikator Keuangan dan Perekonomian Indonesia 1995-1999

Keterangan	1995	1996	1997	1998	1999
Inflasi	9,42	7,973	6,226	58,451	20,478
Lending rate	18,852	19,218	21,818	32,154	27,663
Deposit rate	16,718	17,256	20,014	39,067	25,738
Reserve (miliar)	1.573	4.503	-8.137	-3.437	1.916
Nilai tukar	2.248	2.342	2.909	10.013	7.855
PDB(Pertumbuhan tahunan)	8,22	7,818	4,7	-13,127	0,791

Sumber: *World Bank* (2021), diolah

Pasca krisis tersebut, perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Ditambah lagi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, membuat industri Perbankan Syariah tumbuh lebih cepat lagi (Umi, 2020).

Grafik 1.1

Pertumbuhan ekonomi

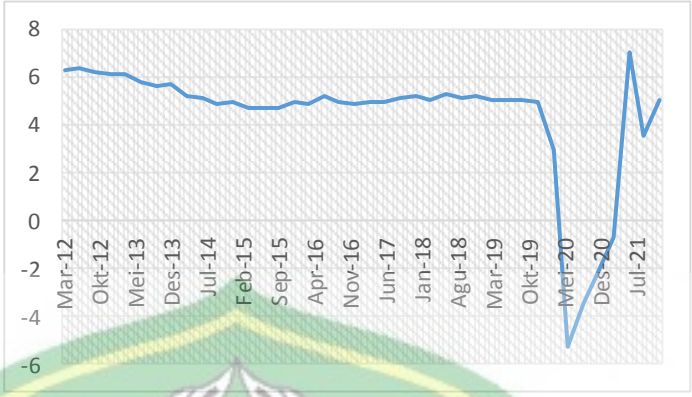

Sumber: Bank Indonesia (diolah kembali)

Dimana bahwa sepanjang tahun 2011, terjadi krisis utang dan defisit anggaran akut di Yunani membuat goncangan-goncangan ekonomi terutama di pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE). Tidak hanya UE dijerat oleh krisis fiskal, problem anggaran di Amerika Serikat juga sangat akut. Oleh karenanya jumlah aliran dana asing alias *hot money* di Indonesia lima kali lipat dibandingkan tahun 1997. Pengetatan likuiditas negara-negara Eropa, sebagai obat krisis utang beberapa negara anggota Uni Eropa, bisa membuat *hot money* di Indonesia ditarik keluar. Ekspor yang terus mengalami pelambatan akibat krisis di Eropa dan Amerika juga menekan nilai tukar rupiah (www.bps.go.id).

Pada tahun 2014 pula ada agenda politik yakni pemilihan presiden, yang mana karena adanya peristiwa penting ini seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perubahan politik dapat mempengaruhi pertumbuhan atau kondisi ekonomi di Indonesia.

Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai 2015 dan bergerak fluktuatif, pada tahun 2016 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkisar pada 5% dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat dampak dari COVID-19.

Grafik 1.2

Perkembangan Inflasi

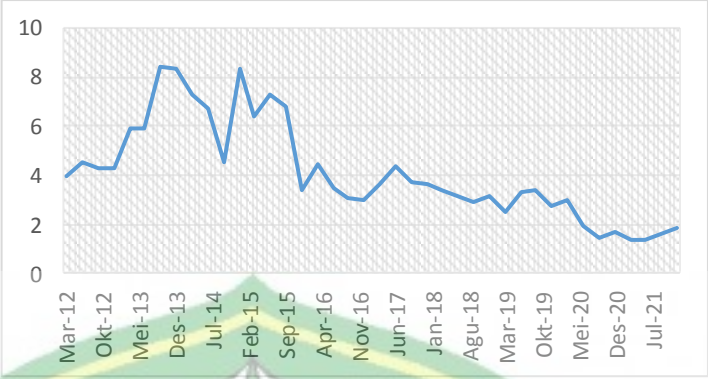

Sumber: Bank Indonesia (diolah kembali)

Sementara, pada grafik 1.2 inflasi tercatat fluktuatif pada tahun 2013 hingga 2015, inflasi tercatat stabil dibawah 5% pada tahhun 2016 hingga 2019 dan pada tahun 2020 inflasi terendah yakni 1,37%.

Pengoptimalan kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong atau menstabilkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dalam PDB, dan tidak hanya itu, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan laju inflasi dan membantu kestabilan nilai tukar, karena stabilitas harga merupakan prasyarat bagi pemulihan dan kelancaram roda perekonomian.

Selanjutnya, untuk dapat melihat dampak kinerja moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi perlu suatu mekanisme transmisi. Berbeda dengan sistem transmisi kebijakan moneter konvensional yang menggunakan instrumen SBI (Sertifikat Bank Indonesia), pada tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan instrumen moneter syariah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Seiring pesatnya perkembangan perbankan syariah, pada tahun 2008 diubah menjadi SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dengan memakai akad ju'alah (Sugianto, 2015)

Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Operasi Pasar Terbuka Syariah salah satunya dapat dilakukan dengan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

Syariah (SBIS) dan *standing facilities* diantaranya dapat dilakukan dengan penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Transmisi kebijakan moneter juga melibatkan interaksi antar perbankan syariah melalui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). PUAS adalah transaksi jangka pendek antarbank baik berupa rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Transaksi PUAS sangat penting untuk menjaga likuiditas bank agar operasionalnya lancar dan sehat, diantaranya untuk menutup kekalahan kliring dan dapat dijadikan *earning assets* bagi bank yang kelebihan dana (Maulidya, 2012).

SBIS, FASBIS, dan PUAS yang disalurkan merupakan instrumen-instrumen dalam transmisi kebijakan moneter syariah yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDB dan kestabilan harga yang diproksikan oleh inflasi. Hal ini sesuai dengan kerangka kerja Bank Indonesia yang menerapkan *flexible ITF (Inflation Targetting Framework)* (Umi, 2020).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk membahas masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hubungannya dengan instrumen kebijakan moneter syariah. Untuk mewujudkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi".**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat teridentifikasi sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah financial inclusion atau inklusi keuangan dengan topik kebijakan dan sistem moneter syariah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini menganalisis pola hubungan antar variable dalam instrumen kebijakan moneter syariah, menggunakan variabel-variabel berupa instrumen pengendalian moneter pada Operasi Moneter Syariah (OMS) yang diberlakukan bank Indonesia terhadap perbankan syariah berupa tingkat imbal dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS) dengan variabel dependen yang digunakan sebagai indikator adalah Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

a. Apakah Variabel SBIS berpengaruh terhadap Tingkat Inflasi Indonesia?
b. Apakah Variabel FASBIS berpengaruh terhadap Tingkat Inflasi Indonesia?
c. Apakah Variabel PUAS berpengaruh terhadap Tingkat Inflasi Indonesia?
d. Apakah Variabel SBIS berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?
e. Apakah Variabel FASBIS berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?
f. Apakah Variabel PUAS berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?
g. Apakah variabel Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Variabel SBIS terhadap Tingkat Inflasi Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Variabel FASBIS terhadap Tingkat Inflasi Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Variabel PUAS terhadap Tingkat Inflasi Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Variabel SBIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Variabel FASBIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh Variabel PUAS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
7. Untuk mengetahui pengaruh Variabel Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

   b. Bagi Penelitian Selanjutnya

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, referensi atau masukan umumnya mengenai instrumen kebijakan moneter syariah, khususnya berkaitan dengan Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Tingkat Inflasi dan

Pertumbuhan Ekonomi.

c. Bagi Pemerintahan Indonesia

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan serta dijadikan bahan acuan dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi dan pertumnuhan ekonomi Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan proposal skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Kondisi Objektif Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis dalam pelaksananaan penelitian tersebut.